

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ananda. 2009. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya. Tonga. 2003. Hukum Pidana Materiil. UMM Press. Malang.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Bambang Sunggono. 2003. Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chairul Huda. 2008. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana Predana Media Group. Jakarta.
- Darwan Prinst. 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Djembatan. Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1987. Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Liberty.
- Erdianto Efendi, 2011, "Hukum Pidana Indonesia", PT. Revika Aditama, Bandung.
- Hamzah Hatrik. 1996. Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Stirct Liablitiy dan Vicarious Liability). Rajawali Press. Jakarta
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Irwansyah, 2021. Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Kristian. 2016. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara). PT Refika Aditama. Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan. Eksepsi dan Putusan Pengadilan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mahrus Ali. 2013. Asas-asas Hukum Pidana Korporasi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Moeljatno. 2002. Asas-asas Hukum Pidana. Rineke Cipta. Jakarta.

- Muhammad Abdul Kholiq. 2002. Buku Pedoman Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Kencana. Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- R. Ali Rido. 2012. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. PT Alumni, Bandung.
- R. Soesilo. 1991. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus. Politeia. Bogor.
- Ridwan Khairandy. 2009. Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi. Total Media. Yogyakarta.
- Said Karim dan Haeranah, 2016, *Buku Ajar Delik-delik di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Soekarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, 2016, *Filsafat Hukum, Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH Undip, Semarang.
- Tonga, 2003, *Hukum Pidana Materii*, UMM Press, Malang
- Zaenal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana 1. Sinar Grafika. Jakarta. Leden Marpaung. Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta

JURNAL

- Abi Pratiwa Siregar, "Kinerja Koperasi di Indonesia" Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika, Fakultas Pertanian Gadjah Mada, Vol. 5, Nomor 1 2020.
- Dahriyanto Imani. 2016, *Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel Oleh Hakim, Lex Crimen* Vol. V No. 5.
- Dudung Mulyadi, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Jual Beli Tanah", Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 5, Nomor 1 September 2017.
- Hijrah Adhyanti Mirzana, Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama, *Jurnal Pandecta*, Volume 7 Nomor 2, Juli 2012.

Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, "Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi Prospeknya), Jurnal.

Yuangga imnai Asmara, 2019, Makalah: "*Aspek Hukum Dalam Bisnis Perusahaan Jawatan*", Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung, Tulungagung.

INTERNET

Greenpermit, 2021, "Perusahaan Umum: Pengertian, Pendirian, & Pengelolaan", <https://greenpermit.id/2021/12/15/perusahaan-umum-perum/>, diakses terakhir pada tanggal (19 Juli 2022).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.